

Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif terhadap Pengungkapan Kerugian Negara pada Kasus Korupsi yang Telah *Inkracht* di KPK

Adryan Rafiandi¹, Susanto Salim²

¹Akuntansi, Fakultas ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara

²Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara

¹adryan.125249277@stu.untar.ac.id ²susantos@fe.untar.ac.id

Abstract

Corruption remains a strategic issue that causes significant state financial losses and hinders national development. The complexity of corruption cases requires approaches capable of identifying, calculating, and disclosing state financial losses accurately and accountably. This study aims to examine the influence of forensic accounting and investigative audit on the disclosure of state financial losses in corruption cases that have obtained final and binding court decisions (inkracht) at the Corruption Eradication Commission (KPK) of the Republic of Indonesia. This research employed a quantitative associative approach using primary data collected through questionnaires distributed to 55 respondents consisting of Functional Corruption Crime Officers, Forensic Auditors, Corruption Investigators, Corruption Inquiry Officers, and Public Prosecutors. Data were analyzed using multiple linear regression, t-test, F-test, and coefficient of determination (R²). The results indicate that forensic accounting and investigative audit do not have a significant partial effect on the disclosure of state financial losses. However, both variables simultaneously have a significant effect on the disclosure of state financial losses. These findings suggest that the effectiveness of disclosing state financial losses is achieved through the integration of forensic accounting and investigative audit rather than through the application of each approach separately. Therefore, strengthening the synergy between forensic accounting and investigative audit is essential to support corruption case handling and improve the quality of state financial loss disclosure

Keywords: forensic accounting; investigative audit; disclosure of state financial losses; corruption; KPK

Abstrak

Korupsi masih menjadi permasalahan strategis yang menyebabkan kerugian keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Kompleksitas kasus korupsi memerlukan pendekatan yang mampu mengidentifikasi, menghitung, dan mengungkapkan kerugian keuangan negara secara akurat dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntansi forensik dan audit investigatif terhadap pengungkapan kerugian keuangan negara pada kasus tindak pidana korupsi yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 55 responden yang terdiri atas Fungsional Tindak Pidana Korupsi, Auditor Forensik, Penyelidik Tindak Pidana Korupsi, Penyidik Tindak Pidana Korupsi, dan Jaksa Penuntut Umum. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi forensik dan audit investigatif tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengungkapan kerugian keuangan negara. Namun, secara simultan kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kerugian keuangan negara. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengungkapan kerugian keuangan

negara lebih ditentukan oleh integrasi antara akuntansi forensik dan audit investigatif dibandingkan penerapan masing-masing pendekatan secara terpisah. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara akuntansi forensik dan audit investigatif menjadi penting dalam mendukung penanganan perkara korupsi serta meningkatkan kualitas pengungkapan kerugian keuangan negara

Kata kunci: akuntansi forensik; audit investigatif; pengungkapan kerugian keuangan negara; korupsi; KPK

© 2026 Jurnal Pustaka Aktiva

1. Pendahuluan

Korupsi masih menjadi permasalahan strategis yang dihadapi berbagai negara karena tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memengaruhi kualitas demokrasi, penegakan hukum, pasar modal, dan efektivitas pelayanan publik. Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2020), korupsi dapat melemahkan institusi serta menghambat optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Di Indonesia, korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Permasalahan korupsi menjadi semakin penting karena tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak terhadap perekonomian nasional, hak sosial masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan. Faridzi dan Nachrawi (2021) menjelaskan bahwa korupsi menghambat upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kondisi tersebut diperkuat oleh posisi Indonesia dalam *Corruption Perceptions Index* yang masih berada di bawah rata-rata internasional pada kelompok negara dengan tingkat perekonomian yang sebanding (Transparency International, 2024).

Dalam praktik pemberantasan korupsi, berbagai perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) sering kali berkaitan dengan kerugian keuangan negara, terutama pada pengadaan barang dan jasa, proyek infrastruktur, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta lembaga keuangan milik negara. Berdasarkan Anti Corruption Learning Center KPK (ACLC KPK), nilai kerugian keuangan negara akibat korupsi mencapai Rp238,14 triliun selama periode 2013–2022. Selain itu, Kejaksaan Agung pada tahun 2024 memperkirakan potensi kerugian negara sebesar Rp279,9 triliun dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Besarnya nilai kerugian tersebut menunjukkan pentingnya mekanisme yang mampu mengidentifikasi, menghitung, dan mengungkapkan kerugian keuangan negara secara akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengungkapan kerugian keuangan negara merupakan proses yang kompleks karena tindak korupsi umumnya melibatkan banyak pihak,

berbagai transaksi, serta skema yang dirancang agar sulit dideteksi. Hopwood, Leiner, dan Young (2012) menyatakan bahwa korupsi dan *fraud* modern sering kali disusun secara kompleks sehingga pendekatan audit konvensional tidak selalu memadai untuk menentukan nilai kerugian negara secara tepat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan khusus yang mampu menelusuri transaksi, merekonstruksi kondisi keuangan, dan mendukung pembuktian dalam proses hukum.

Salah satu pendekatan yang digunakan adalah akuntansi forensik. Tuanakotta (2010) menjelaskan bahwa akuntansi forensik merupakan penerapan disiplin akuntansi untuk tujuan penegakan hukum, termasuk pelaksanaan audit investigatif dalam proses peradilan. Crumbley (2005) menambahkan bahwa akuntansi forensik digunakan untuk mendukung litigasi dan penyelesaian perkara hukum. Selain itu, audit investigatif juga berperan penting dalam mengumpulkan bukti, merekonstruksi kejadian, dan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu penyimpangan (Tuanakotta, 2010). Dengan demikian, kedua pendekatan tersebut dipandang mampu mendukung pengungkapan kerugian keuangan negara pada kasus korupsi.

Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang belum konsisten. Nasution et al. (2023) menemukan bahwa akuntansi forensik secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kerugian keuangan negara. Sebaliknya, Crumbley, Heitger, dan Smith (2005/2017) serta Rezaee, Crumbley, dan Elmore (2004) menegaskan bahwa efektivitas akuntansi forensik akan lebih optimal apabila diintegrasikan dengan proses investigasi. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian pengaruh akuntansi forensik dan audit investigatif terhadap pengungkapan kerugian keuangan negara pada kasus korupsi yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) di KPK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntansi forensik dan audit investigatif terhadap pengungkapan kerugian keuangan negara serta memberikan bukti empiris mengenai kontribusi kedua pendekatan tersebut dalam mendukung penanganan perkara korupsi

Hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

- H1:** Akuntansi forensik berpengaruh terhadap pengungkapan kerugian keuangan negara.
H2: Audit investigatif berpengaruh terhadap pengungkapan kerugian keuangan negara.
H3: Akuntansi forensik dan audit investigatif secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan kerugian keuangan negara.

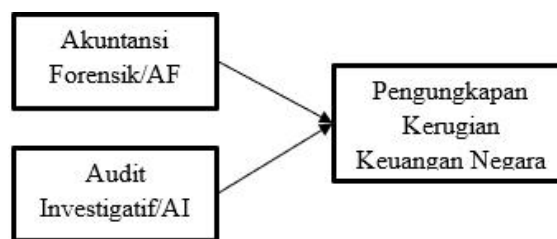
2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif untuk menguji hubungan antara akuntansi forensik dan audit investigatif terhadap pengungkapan kerugian keuangan negara. Lokasi penelitian dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang memiliki keterkaitan langsung maupun pemahaman terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi dan pengungkapan kerugian keuangan negara. Populasi penelitian terdiri atas aparat atau pegawai KPK yang terlibat dalam proses penanganan perkara korupsi. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Jumlah sampel sebanyak 55 responden yang terdiri atas Fungsional Tindak Pidana Korupsi, Auditor Forensik, Penyelidik Tindak Pidana Korupsi, Penyidik Tindak Pidana Korupsi, dan Jaksa Penuntut Umum. Pengumpulan data dilakukan secara daring menggunakan kuesioner berbasis Google Form yang disusun berdasarkan variabel penelitian.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Jabatan	Jumlah
Fungsional Tindak Pidana Korupsi	9
Auditor Forensik	27
Penyelidik Tindak Pidana Korupsi	9
Penyidik Tindak Pidana Korupsi	4
Jaksa Penuntut Umum	6
Total	55

Model penelitian menempatkan akuntansi forensik (X1) dan audit investigatif (X2) sebagai variabel independen serta pengungkapan kerugian keuangan negara (Y) sebagai variabel dependen. Hubungan antarvariabel dibangun berdasarkan hipotesis yang menguji pengaruh akuntansi forensik terhadap pengungkapan kerugian keuangan negara, pengaruh audit investigatif terhadap pengungkapan kerugian keuangan negara, serta pengaruh kedua variabel independen tersebut secara simultan terhadap pengungkapan kerugian keuangan negara.



Gambar 1. Model Penelitian

Model penelitian dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan uji F digunakan untuk menguji pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui kemampuan model dalam menjelaskan variasi pengungkapan kerugian keuangan negara. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Pengungkapan Kerugian Keuangan Negara;

α = Konstanta;

β_1 dan β_2 = Koefisien regresi;

X_1 = Akuntansi Forensik;

X_2 = Audit Investigatif;

e = Error.

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Akuntansi Forensik (X1)	Keterampilan dasar dan kemampuan analisis	Pendidikan di bidang akuntansi dan audit, pengendalian internal, komunikasi, pemahaman investigatif kecurangan, teknik audit dan pengumpulan bukti, kerahasiaan, pemahaman atas bukti yang relevan dan kompeten, teknologi dan informasi, profesionalisme, kewawasan luas, dan taat pada aturan	Likert
	Kapabilitas teknis	Hukum dan peraturan, keterampilan investigatif dan analitis kritis, teori metode dan pola kecurangan, perencanaan audit, pelacakan dan pemantauan sumber daya jaringan dan data, pemberian hadiah kepada pelapor fraud, dan menghadirkan saksi ahli	Likert
Audit Investigatif (X2)	Keterampilan dasar dan kemampuan analisis	Pendidikan di bidang akuntansi dan audit, pengendalian internal, komunikasi, pemahaman investigatif kecurangan, teknik audit dan	Likert

Pengungkapan Kerugian Keuangan Negara (Y)	Kapabilitas teknis	pengumpulan bukti, kerahasiaan, pemahaman atas bukti yang relevan dan kompeten, teknologi dan informasi, profesional skeptisme, berwawasan luas, dan taat pada aturan	Likert
	Sikap dan mental	Keahlian teknologi informasi, dasar aturan, pengetahuan terkait tindak pidana korupsi, objektivitas, independensi, netralitas dan asas praduga tak bersalah, membuat hipotesis, serta membuktikan hipotesis	Likert
	Metode pengungkapan	Standar audit investigatif, independensi, hak untuk skeptisme profesional, dan sikap kritis	Likert
	Prosedur pengungkapan	Pembagian tugas, lingkup audit, dan metodologi	Likert
		Permintaan audit investigatif, standar dan aturan tertulis terkait prosedur pengungkapan fraud, pengumpulan bukti, pengungkapan fraud dan prosedur pelaporan, serta proses pemutusan tindakan terhadap pelaku	Likert

Sumber pengukuran variabel mengacu pada Nasution, A. K., Afrizal, dan Wiralestari (2023) yang meneliti pengaruh akuntansi forensik dan audit investigatif terhadap pengungkapan kerugian keuangan negara. Data yang diperoleh dari kuesioner selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menguji hubungan antarvariabel serta menjawab hipotesis penelitian mengenai pengaruh akuntansi forensik dan audit investigatif terhadap pengungkapan kerugian keuangan negara.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini melibatkan 55 responden yang terdiri atas Fungsional Tindak Pidana Korupsi (TPK), Auditor Forensik, Penyelidik TPK, Penyidik TPK, dan Jaksa Penuntut Umum di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karakteristik responden disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Kelompok Responden	Jumlah
Fungsional Tindak Pidana Korupsi	9
Auditor Forensik	27
Penyelidik Tindak Pidana Korupsi	9
Penyidik Tindak Pidana Korupsi	4
Jaksa Penuntut Umum	6
Total	55

Mayoritas responden merupakan Auditor Forensik sebanyak 27 orang (49,1%), diikuti Fungsional TPK dan Penyelidik TPK masing-masing sebanyak 9 orang (16,4%). Komposisi tersebut menunjukkan

bahwa sebagian besar responden memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan dalam proses pengungkapan kerugian keuangan negara.

Analisis instrumen dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh variabel penelitian memenuhi syarat validitas dan reliabilitas sehingga layak digunakan dalam pengujian regresi. Uji validitas menggunakan korelasi Pearson dengan nilai r-tabel sebesar 0,266 (n = 55; df = 53). Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel Akuntansi Forensik (X1), Audit Investigatif (X2), dan Pengungkapan Kerugian Keuangan Negara (Y) memiliki nilai r-hitung lebih besar daripada r-tabel dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dengan demikian seluruh item pernyataan dinyatakan valid.

Tabel 4. Ringkasan Hasil Uji Validitas

Variabel	Jumlah Indikator	Hasil
Akuntansi Forensik (X1)	17	Seluruh indikator valid
Audit Investigatif (X2)	20	Seluruh indikator valid
Pengungkapan Kerugian Keuangan Negara (Y)	8	Seluruh indikator valid

Selanjutnya, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,70 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Indikator	Hasil
Akuntansi Forensik (X1)	0,966	Reliabel
Audit Investigatif (X2)	0,967	Reliabel
Pengungkapan Kerugian Keuangan Negara (Y)	0,936	Reliabel

Selain itu, analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel Audit Investigatif memiliki rata-rata skor tertinggi dibandingkan variabel Akuntansi Forensik dan Pengungkapan Kerugian Keuangan Negara. Hal ini menunjukkan bahwa responden menilai audit investigatif sebagai instrumen yang sangat penting dalam proses pembuktian dan pengungkapan tindak pidana korupsi.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, model regresi diuji melalui uji asumsi klasik yang meliputi normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Hasil uji normalitas menunjukkan titik-titik residual berada di sekitar garis diagonal pada grafik Normal Probability Plot sehingga data berdistribusi normal. Uji autokorelasi menghasilkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,802 yang menunjukkan tidak terjadi autokorelasi. Uji multikolinearitas menghasilkan nilai tolerance sebesar 0,476 dan VIF sebesar 2,100, sehingga tidak

terjadi multikolinearitas. Sementara itu, hasil uji heteroskedastisitas melalui scatterplot menunjukkan penyebaran titik residual secara acak tanpa membentuk pola tertentu sehingga model bebas dari heteroskedastisitas

Tabel 6. Ringkasan Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian	Hasil	Kesimpulan
Normalitas	Titik mengikuti garis diagonal	Normal
Autokorelasi	DW = 1,802	Tidak terjadi autokorelasi
Multikolinearitas	Tolerance = 0,476; VIF = 2,100	Tidak terjadi multikolinearitas
Heteroskedastisitas	Scatterplot acak	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh asumsi regresi telah terpenuhi sehingga model layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Pengaruh Akuntansi Forensik terhadap Pengungkapan Kerugian Keuangan Negara

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Akuntansi Forensik memiliki koefisien sebesar 0,123 dengan nilai t-hitung sebesar 1,443 dan tingkat signifikansi sebesar 0,155 ($>0,05$). Dengan demikian, Akuntansi Forensik tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Kerugian Keuangan Negara sehingga H1 ditolak.

Pengaruh Audit Investigatif terhadap Pengungkapan Kerugian Keuangan Negara

Variabel Audit Investigatif memiliki koefisien sebesar 0,112 dengan nilai t-hitung sebesar 1,504 dan tingkat signifikansi sebesar 0,139 ($>0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa Audit Investigatif juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Kerugian Keuangan Negara sehingga H2 ditolak.

Tabel 7. Hasil Uji t

Variabel	Koefisien (B)	t-hitung	Sig.	Keputusan
Akuntansi Forensik (X1)	0,123	1,443	0,155	H1 Ditolak
Audit Investigatif (X2)	0,112	1,504	0,139	H2 Ditolak

Meskipun kedua variabel menunjukkan arah hubungan positif, pengaruhnya secara parsial belum signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa akuntansi forensik maupun audit investigatif belum mampu secara mandiri meningkatkan pengungkapan kerugian keuangan negara. Dalam praktik penanganan tindak pidana korupsi, hasil analisis akuntansi forensik dan audit investigatif perlu didukung oleh alat bukti lain, proses penyidikan, penuntutan, serta pembuktian hukum yang memadai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Crumbley, Heitger, dan Smith (2017), Rezaee, Crumbley, dan

Elmore (2006), serta Hopwood, Leiner, dan Young (2012) yang menegaskan bahwa efektivitas akuntansi forensik akan meningkat apabila diintegrasikan dengan proses investigasi yang komprehensif. Selain itu, Wells (2017), Singleton et al. (2010), INTOSAI (2019), dan Albrecht et al. (2019) menjelaskan bahwa audit investigatif berfungsi sebagai sarana identifikasi penyimpangan dan pengumpulan bukti, namun keberhasilan pengungkapan fraud maupun kerugian negara tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor lain di luar audit itu sendiri.

Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif terhadap Pengungkapan Kerugian Keuangan Negara

Berbeda dengan hasil pengujian parsial, hasil uji simultan menunjukkan bahwa Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Kerugian Keuangan Negara.

Tabel 8. Hasil Uji F

F-hitung	F-tabel	Sig.	Keputusan
7,860	3,175	0,001	H3 Diterima

Nilai F-hitung sebesar 7,860 dengan tingkat signifikansi 0,001 ($<0,05$) menunjukkan bahwa H3 diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa kombinasi antara akuntansi forensik dan audit investigatif mampu meningkatkan efektivitas pengungkapan kerugian keuangan negara dibandingkan apabila kedua pendekatan tersebut diterapkan secara terpisah.

Temuan ini mendukung penelitian Nasution, Afrizal, dan Wiralestari (2023) serta Sinaga dan Rahmah (2023) yang menyatakan bahwa integrasi akuntansi forensik dan audit investigatif dapat memperkuat proses pengungkapan fraud maupun kerugian keuangan negara. Akuntansi forensik berperan dalam mengidentifikasi pola transaksi, menghitung kerugian, dan menelusuri aliran dana, sedangkan audit investigatif berperan dalam memperoleh bukti, menguji dugaan penyimpangan, serta merekonstruksi kejadian yang terjadi. Sinergi kedua pendekatan tersebut menghasilkan proses investigasi yang lebih komprehensif dan efektif.

Kemampuan model dalam menjelaskan variasi Pengungkapan Kerugian Keuangan Negara dapat dilihat dari hasil uji koefisien determinasi.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
0,482	0,232	0,203

Nilai R^2 sebesar 0,232 menunjukkan bahwa Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif secara simultan mampu menjelaskan 23,2% variasi Pengungkapan Kerugian Keuangan Negara, sedangkan 76,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan kerugian keuangan negara merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Selain akuntansi forensik dan audit investigatif, faktor lain yang berpotensi memengaruhi pengungkapan kerugian keuangan negara antara lain kompetensi auditor, kualitas alat bukti, independensi organisasi, efektivitas sistem whistleblowing, koordinasi antarinstansi, efektivitas penegakan hukum, serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa akuntansi forensik dan audit investigatif tidak memberikan pengaruh signifikan secara parsial, namun memberikan pengaruh signifikan secara simultan terhadap pengungkapan kerugian keuangan negara. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi kedua pendekatan tersebut dalam mendukung pengungkapan kerugian keuangan negara pada penanganan perkara tindak pidana korupsi di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntansi forensik dan audit investigatif terhadap pengungkapan kerugian keuangan negara pada kasus tindak pidana korupsi yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi forensik dan audit investigatif secara individual belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan kerugian keuangan negara. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemampuan analisis keuangan maupun proses investigasi secara terpisah belum cukup untuk mendukung pengungkapan kerugian keuangan negara secara optimal.

Namun demikian, ketika akuntansi forensik dan audit investigatif diterapkan secara terpadu, keduanya terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan kerugian keuangan negara. Temuan ini menunjukkan bahwa pengungkapan kerugian keuangan negara memerlukan sinergi antara kemampuan analisis dan penelusuran transaksi keuangan yang dimiliki akuntansi forensik dengan kemampuan pengumpulan, pengujian, dan pembuktian bukti yang dimiliki audit investigatif. Dengan kata lain, efektivitas pengungkapan kerugian keuangan negara tidak bergantung pada satu pendekatan tertentu,

melainkan pada integrasi kedua pendekatan tersebut dalam proses penanganan perkara korupsi.

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa lembaga penegak hukum, khususnya KPK, perlu terus memperkuat kolaborasi antara fungsi akuntansi forensik dan audit investigatif untuk meningkatkan kualitas pengungkapan kerugian keuangan negara. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain di luar akuntansi forensik dan audit investigatif yang memengaruhi pengungkapan kerugian keuangan negara, seperti kualitas alat bukti, kompetensi aparat penegak hukum, koordinasi antarinstansi, sistem pengendalian internal, dan aspek hukum yang berlaku.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel lain yang relevan sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan kerugian keuangan negara dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Daftar Rujukan

- [1] Abdillah dkk. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif. Sumedang: CV. Mega Press Nusantara.
- [2] Adhitama S. dkk. (2021). APBN 101: Mengenal APBN Untuk Pemula. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- [3] Agustina, S., Saputra, R., Hernowo, A. A., & Sembiring, A. E. (2018). Penjelasan hukum: Sifat melawan hukum dalam kasus korupsi. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan
- [4] Alshurafat, H. (2024). New variables and measurements of forensic accounting: implications on financial reporting and auditing. *Discover Sustainability*, 5(1). <https://doi.org/10.1007/s43621-024-00544-4>.
- [5] Andriani, Rahmawati, & Kasran, M. (2020). Pengaruh akuntansi forensik dan audit investigatif terhadap pengungkapan fraud (Studi pada Kantor BPKP di Kota Makassar). *Jurnal Penelitian Akuntansi dan Audit "Goodwill"*, 7(2), 1-14.
- [6] Anggraini, D., Triharyati, E., & Novita, H. A. (2019). Akuntansi forensik dan audit investigatif dalam pengungkapan fraud. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 2(2), 372-380.
- [7] Ariyanto, R. (2020). Analisis Komparatif Sertifikasi Auditor: Certified Fraud Examiner (CFE) Dan Certified Forensic Auditor (CFrA). *ABIS Accounting and Business Information Systems Journal*, 7(4). <https://doi.org/10.22146/abis.v7i4.58878>.
- [8] Bana, J. O. (2020). Impact of forensic accounting investigation on public sector financial crimes in Nigeria. *Bingham University Journal of Accounting and Business*, 2(1), 261-268
- [9] Budiwitjaksana, G. S., Trisnarningsih, S., Sundari, S., Susilowati, E., & Habibie, S. A. M. (2025). Akuntansi forensik: Memahami fraud dan investigasi keuangan. PT Mafy Media Literasi Indonesia
- [10] Cahya, A. R., Espa, V., & Fahmi, M. (2025). ANALISIS PERAN AKUNTANSI FORENSIK DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *Worksheet Jurnal Akuntansi*, 4(2), 306-319. <https://doi.org/10.46576/wjs.v4i2.6532>.

- [11] Ceschel, F., Hinna, A., & Homberg, F. (2022). Public sector strategies in curbing corruption: A review of the literature. *Public Organization Review*, 22, 571-591.
- [12] Crumbley, D. L., Heitger, L. E., & Smith, G. S. (2005). *Forensic and investigative accounting*. CCH Group.
- [13] Crumbley, D. L., Fenton, E. D., Jr., Smith, G. S., & Heitger, L. E. (2017). *Forensic and investigative accounting* (8th ed.). Wolters Kluwer.
- [14] Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A study in the social psychology of embezzlement*. Glencoe, IL: The free press.
- [15] Donelson, D. C., Kartapanis, A., Koutney, C. Q., & Zhao, C. X. (2025). Public and private enforcement of non-GAAP reporting. *Journal of Accounting and Public Policy*, 52, 107338. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2025.107338>.
- [16] Faridzi, M. A., & Nachrawi, G. (2022). Kualifikasi kejahatan luar biasa terhadap tindak pidana korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/PID.SUS/2021). *journal.upy.ac.id*. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3244>
- [17] Glogić, E., & Jasak, Z. (2021). Benford's law in forensic analysis of registered turnover. *Journal of Forensic Accounting Profession*, 1(1), 50-60
- [18] Ghozali, I., & Chariri, A. (2014). *Teori akuntansi* (Edisi ke-4). Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- [19] Hakim, U. (2014). Eksistensi akuntansi forensik dalam penyidikan dan pembuktian pidana korupsi. *Unnes Law Journal*, 3(1), 55-61
- [20] Hair, D., Dkk., (2006). *Multivariate Data Analysis Pearson*. edisi keenam. Kennesaw State University: Kennesaw
- [21] Hopwood, W. S., Leiner, J. J., & Young, G. R. (2012). **Forensic accounting and fraud examination** (2nd ed.). McGraw-Hill.
- [22] International Organization of Supreme Audit Institutions. (2019). INTOSAI-P 12: The value and benefits of Supreme Audit Institutions—Making a difference to the lives of citizens. INTOSAI
- [23] Jejak korupsi e-KTP - Visual Interaktif Kompas. (n.d.). <https://vik.kompas.com/korupsi-e-ktp>
- [24] Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and analytical issues. *Hague Journal on the Rule of Law*, 3(02), 220–246. <https://doi.org/10.1017/s1876404511200046>.
- [25] Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi [Peraturan Pimpinan KPK]
- [26] Kuntadi, C., Isnaini, R. S. F., & Pramukty, R. (2022). Pengaruh Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Independensi, dan Skeptisme Profesional Terhadap Pengungkapan Fraud. *Sentri Jurnal Riset Ilmiah*, 2(1), 250–259. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i1.465>.
- [27] Korupsi dan Kerugian Keuangan Negara yang Ditimbulkannya - ACLC KPK. (n.d.). Pusat Edukasi Antikorupsi. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240229-korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-yang-ditimbulkannya>
- [28] Koeswayo, P. S., Handoyo, S., & Hasyir, D. A. (2024). Investigating the relationship between public governance and the corruption perception index. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2342513.
- [29] Lidyah, R. (2016). Korupsi dan akuntansi forensik. *I-Finance*, 2(2), 72-91.
- [30] Munyepwa, K., Ranganayi, C., Mudzengerere, L., Mutongoreni, N., Gwesu, N. C., & Machaka, T. H. (2025). The role of forensic accounting in combating public sector corruption in Zimbabwe. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 7(1), 177-195
- [31] Mumu, E. I. (2024). Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dengan Metode Audit Investigatif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/57831>.
- [32] Nasution, A. K., Afrizal, & Wiralestari. (2023). The influence of forensic accounting and investigative auditing on disclosure of state financial losses. *American International Journal of Business Management*, 6(6), 95-108.
- [33] Paymaster, B. (2021). Forensic Audit: a tool for fraud detection and prevention in Nigerian banks. <https://www.semanticscholar.org/paper/Forensic-Audit%3A-A-Tool-for-Fraud-Detection-and-in-Paymaster/e7ef0c36fd2129b827aa6a81154b08b683991e2a#citing-papers>.
- [34] Rezaee, Z., Crumbley, D. L. and Elmore, R.C. 2004. Forensic Accounting Education: A Survey of Academicians and Practitioners. *Advances in Accounting Education: Teaching and Curriculum Innovations*, 6: 193-231.
- [35] Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). Corruption and government. In Cambridge University Press eBooks. <https://doi.org/10.1017/cbo9781139962933>.
- [36] Sihombing, E. (2025). Determinan akuntan forensik terhadap kualitas audit penghitungan kerugian keuangan negara di Indonesia. Disertasi. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- [37] Sumartono, Urumsah, D., & Hamdani, R. (2020). Skills of the forensic accountants in revealing fraud in public sector: The case of Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 21(1), 180-194.
- [38] Situmeang, U. M., & Susanto, D. S. (2024). Evaluasi Metode Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. *Owner*, 8(3). <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2209>
- [39] Syahawaluna, A., & Arsyfi, M. S. N. (2023). Metode dan faktor penghitungan kerugian keuangan negara pada BPKP Jakarta. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 20(2), 1-21.
- [40] Syahawaluna, A., & Arsyfi, M. S. N. (2024, March 14). Metode dan Faktor Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada BPKP Jakarta. *Syahawaluna | Transformasi*. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/Tfs/article/view/2444>.
- [41] Tuanakotta, T. M. (2010). Akuntansi forensik dan audit investigatif. Jakarta: Salemba Empat, 431.
- [42] Transparency International. (2026, January 29). Corruption Perceptions Index 2024. *Transparency.org*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2024>.
- [43] United Nations. (n.d.). International Anti-Corruption Day | United Nations. <https://www.un.org/en/observances/anti-corruption-day>.
- [44] View of Investigative Auditing and Fraud: A Systematic Literature Review through a Theoretical and Bibliometric Lens. (n.d.). <https://apfjournal.or.id/index.php/apf/article/view/400/336>
- [45] Ziah, S. U., & Kuntadi, C. (2023). Pengaruh Akuntansi Forensik Kemampuan dan Pengendalian Internal Audit Investigasi Terhadap Pengungkapan Fraud (Studi pada Kantor BPKP Makassar). *JURNAL ECONOMINA*, 2(2), 622–629. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.341>.